

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-135.01.2.692007/2025

A. Dasar Hukum :

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara/Lembaga

: (135)

KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi

: (01)

SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi

: (05)

JAWA TIMUR
4. Kode>Nama Satker

: (692007)

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
- Sebesar

:Rp.

29.867.961.000,00

(Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03

KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03

PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	29.867.961.000,00
135.01.WA.7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp.	29.867.961.000,00

C. Sumber Dana Berasal Dari:

1. Rupiah Murni

Rp.

29.867.961.000,00

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0,00
2. PNBP

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

0,00
- PNBP TA Berjalan

Rp.

0,00

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

0,00
5. Hibah Langsung

Rp.

0,00
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0,00

- Hibah Luar Negeri Langsung

Rp.

0,00
- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0,00

- Hibah Dalam Negeri Langsung

Rp.

0,00
- Hibah Luar Negeri

Rp.

0,00

6. SBSN PBS

Rp.

0,00

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN Surabaya II

(135)

Rp.

29.867.961.000,00

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.01.2.692007/2025
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode / Nama Satker : (692007) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Jakarta, 2 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA
-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.01.2.692007/2025
I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga: (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (692007) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

						Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	29.867.961.000,00	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
1. Rupiah Murni	Rp.	29.867.961.000,00			(2) RPLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
2. PNBP	Rp.	0,00		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0,00			(2) RHLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0,00		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0,00		
5. Hibah Langsung	Rp.	0,00		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0,00		
6. SBSN PBS	Rp.	0,00		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0,00		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0,00		

2. Rincian Pinjaman/Hibah : (dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.01.2.692007/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara / Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode / Nama Satker : (692007) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD) KANTOR DAERAH

Halaman II.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
692007	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR	13.858.518,00	7.020.609,00	8.988.834,00	-	-	29.867.961,00	05.51	RM
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	13.858.518,00	7.020.609,00	8.988.834,00	-	-	29.867.961,00		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	13.858.518,00	7.020.609,00	8.988.834,00	-	-	29.867.961,00		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	13.858.518,00	5.749.139,00	-	-	-	19.607.657,00		
01	RM	13.858.518,00	5.749.139,00	-	-	-	19.607.657,00	135@	
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	-	8.988.834,00	-	-	8.988.834,00	05.51	
01	RM	-	-	8.988.834,00	-	-	8.988.834,00	135	
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	430.556,00	-	-	-	430.556,00	05.51	
01	RM	-	430.556,00	-	-	-	430.556,00	135@	RM
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	840.914,00	-	-	-	840.914,00	05.51	
01	RM	-	840.914,00	-	-	-	840.914,00	135@	
	JUMLAH	13.858.518,00	7.020.609,00	8.988.834,00	-	-	29.867.961,00		

Jakarta, 2 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.

NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.01.2.692007/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : (692007) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : III.1
(dalam ribuan rupiah)

No.	KODE	SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN												JUMLAH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692007	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.333.097	2.036.153	2.956.336	1.801.066	2.517.207	2.917.748	2.374.617	2.570.815	4.511.072	2.710.874	2.536.797	1.602.180	29.867.961
		51 BELANJA PEGAWAI	977.746	977.746	1.955.492	977.746	977.746	2.040.528	977.746	977.746	977.746	977.746	977.746	1.062.784	13.858.518
		52 BELANJA BARANG DAN	355.351	659.627	587.889	552.377	712.162	642.027	558.880	641.415	679.783	585.577	562.126	483.396	7.020.609
		53 BELANJA MODAL	0	398.780	412.955	270.943	827.299	235.193	837.991	951.654	2.853.543	1.147.551	996.925	56.000	8.988.834
		135.01.WA.7099 Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.333.097	2.036.153	2.956.336	1.801.066	2.517.207	2.917.748	2.374.617	2.570.815	4.511.072	2.710.874	2.536.797	1.602.180	29.867.961
		51 BELANJA PEGAWAI	977.746	977.746	1.955.492	977.746	977.746	2.040.528	977.746	977.746	977.746	977.746	977.746	1.062.784	13.858.518
		52 BELANJA BARANG DAN	355.351	659.627	587.889	552.377	712.162	642.027	558.880	641.415	679.783	585.577	562.126	483.396	7.020.609
		53 BELANJA MODAL	0	398.780	412.955	270.943	827.299	235.193	837.991	951.654	2.853.543	1.147.551	996.925	56.000	8.988.834

Jakarta, 2 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA
-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.01.2.692007/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode / Nama Satker : [692007] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
692007	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 667.674,00		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 495.352,00
	52 BELANJA BARANG DAN Rp. 667.674,00		Catatan
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		Tidak dapat dicairkan Rp. 247.676,00
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 528.360,00		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 16.200,00
	Catatan		Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 264.180,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 8.100,00
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 23.400,00		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM) 59.552,00
	Catatan		Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 11.700,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 29.776,00
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 202.284,00		
	Catatan		
	Tidak dapat dicairkan Rp. 101.142,00		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 10.200,00		
	Catatan		
	Tidak dapat dicairkan Rp. 5.100,00		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 2 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.

NICO AFINTA

-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.01.2.692007/2025
IV B. C A T A T A N

Kementerian Negara / Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode / Nama Satker : [692007] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
692007	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 5.790.301,00		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	- Rehab 8 Unit Rumah Dinas Eselon III 70M2 Total 560M2, Infrastruktur lingkungan 1993.95 M2, Pagar tembok pembatas lahan belakang 130M2 Rp. 3.209.556,00		
	- Revitalisasi jaringan listrik : (1) Ged. sekretariat dan bagian umum 790M2, (2) Ged. Pemasyarakatan dan Keimigrasian 405M2, (3) Ged. Yankum 440 M2, (4) Ged. Bagian Program dan Humas 270 M2 Rp. 2.580.745,00		

Jakarta, 2 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

NICO AFINTA
-